



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUWITO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 458612

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 414.250.000**

1. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
2. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI
Rp. 35.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp.
15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/36 m2 di KAB / KOTA
PASER, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/60 m2 di KAB / KOTA
PASER, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 693 m2/112 m2 di KAB / KOTA
PASER, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/168 m2 di KAB / KOTA
PASER, HASIL SENDIRI Rp. 27.250.000
8. Tanah Seluas 16345 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI
Rp. 101.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 262.500.000**

1. MOTOR, HONDA XIB02N04L0 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 4.500.000



2. MOBIL, TOYOTA RUSH MOBIL PENUMPANG Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 258.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	30.050.250
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	323.819.327
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.030.619.577
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.030.619.577

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.